

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD). Rancangan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021.

Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu satu Tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tetap berpedoman pada Renstra SKPD dan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perubahan dalam Renja Tahun 2021 memuat perubahan pagu anggaran dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dan disesuaikan dengan Pagu Daerah yang telah mengalami revisi atau reconfusing anggaran mendahului perubahan akibat penanganan bencana Nasional Non Alam Pandemi Covid-19 yakni yang melanda mulai tahun 2020. Pada dasarnya penjabaran Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 ini senantiasa mengacu pada pelaksanaan kegiatan dengan tidak mengabaikan Protokol Kesehatan Covid-19. Hal ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ, Nomor : 177/KMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dalam rangka mewujudkan *good governance* dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program, kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu Tahun 2021 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 314);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2025 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 200 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021 – 2026;

23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng;
24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021
25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;.
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2021;
27. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor/BPKPD/VIII/2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Review Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan 2021. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk:

1. Menjadi kerangka dasar bagi Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik secara internal maupun secara eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja Tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Tahunnya.
4. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam menentukan prioritas-prioritas program di bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Memberikan Pelayanan di bidang Administrasi Keuangan Daerah yang lebih berkualitas;
6. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Tersedianya informasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang cepat dan akurat, dan tersedianya Piranti pendukung pengelolaan keuangan daerah yang memadai.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

B A B I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

B A B II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sampai dengan tahun (2021), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

2.2. Analisis Kerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Berisikan uraian Mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kerja yang di capai oleh SKPD.

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

B A B III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

B A B IV. PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

B A B II

HASIL DAN EVALUASI RENJA TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Triwulan II

Sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tentang tugas fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 di tuangkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2021. Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah;
3. Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng;

Sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut dilaksanakan melalui program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 dengan rincian 4 (Empat) Program, 1 Kegiatan dan 59 Sub kegiatan.

Pada Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya adapun realisasi hingga Triwulan ke II Tahun anggaran 2021. Alokasi dana yang dianggarkan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) **mendahului perubahan Pertama** sebesar Rp.144.587.197.551,- dengan realisasi sebesar Rp.25.823.654.607,- atau 17,86 dari besaran Pagu anggaran Pokok yakni Rp.150.720.971.196,-. Realisasi Fisik Output pada Triwulan ke II sebesar 54,79%.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng meliputi :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan dengan 8 (delapan) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.24.150.382.019,- dapat terealisasi sebesar Rp.10.470.710.177,- atau 43.36% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Daerah yang sesuai regulasi. Jumlah Anggaran Rp.39.360.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.604.450,- atau 42.19% dan realisasi Fisik output sebesar 43,48% dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.5.795.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.544.300,- atau 61.16%. Sedangkan realisasi fisik output triwulan II sebesar 40.00%.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen RKA yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.12.955.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.372.200,- atau 33.75%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 40.00%
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.13.310.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.388.600,- atau 25.46%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.7.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.299.350,- atau 72.59%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 44,44% dan fisik proses triwulan II sebesar 60.00%
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan. Jumlah Anggaran Rp.15.727.176.519,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.251.844.240,- atau 33.39% dan capaian fisik output 50% dengan implementasi Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Hasil yang dicapai adalah jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya. Jumlah Anggaran Rp.15.605.873.519,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.215.075.540,- atau 33.42%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 100% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.

- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, hasil yang dicapai adalah jumlah SPM yang diverifikasi. Jumlah Anggaran Rp.107.840.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.910.000,- atau 27.74%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 24,17% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan (Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.13.463.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.858.700,- atau 50.94%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 33,33% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.94%.
- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. Hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan sumber daya pengelola retribusi daerah. Jumlah Anggaran Rp.2.054.353,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00% dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah, Hasil yang dicapai adalah Jumlah Objek Retribusi. Jumlah Anggaran Rp.2.054.353,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 30.00%.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase peningkatan kedisiplinan sumber daya aparatur. Jumlah anggaran Rp.39.200.000,0- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.699.950,- atau 32.40% dan realisasi Fisik sebesar 50% dengan implementasi sub kegiatan sebagai berikut :
 - e) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, hasil yang dicapai adalah jumlah dokumen kepegawaian. Jumlah anggaran Rp.39.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.699.950,- atau 32.40%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 57,14% dan fisik proses triwulan II sebesar 57.14%.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran. Jumlah anggaran Rp.881.338.970,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.364.009.150,- atau 41.30% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, hasil yang dicapai adalah Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan. Jumlah anggaran sebesar Rp.15.523.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.198.000,- atau

- 33.48%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, hasil yang dicapai adalah Jumlah Jumlah paket bahan logistik kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp.133.565.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.68.280.000,- atau 51.12%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, hasil yang dicapai adalah Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan. Jumlah anggaran sebesar Rp.322.182.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.87.323.750,- atau 27.10%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 51,92% dan fisik proses triwulan II sebesar 52.00%.
 - d) Penyediaan Bahan Material, hasil yang dicapai adalah Jumlah jenis bahan/material yang disediakan. Jumlah anggaran sebesar Rp.248.699.370,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.110.088.000,- atau 44.27%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu, hasil yang dicapai adalah Jumlah tamu yang difasilitasi. Jumlah anggaran sebesar Rp.16.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.150.000,- atau 62.46%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 95% dan fisik proses triwulan II sebesar 95.00%.
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya. Jumlah anggaran sebesar Rp.145.118.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.82.969.400,- atau 57.17%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 100% dan fisik proses triwulan II sebesar 100.00%.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan peralatan dan mesin kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp.270.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.268.774.000,- atau 99.51% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan. Jumlah anggaran sebesar Rp.270.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.268.774.000,- atau 99.51%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 100% dan fisik proses triwulan II sebesar 100.00%.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran. Jumlah anggaran sebesar

Rp.7.041.847.027,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.384.709.965,- atau 33.86% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket pengiriman. Jumlah anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.909.000,- atau 9.09%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, hasil yang dicapai adalah Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik. Jumlah anggaran sebesar Rp.6.512.047.027,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.204.528.465,- atau 33.85%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, hasil yang dicapai adalah Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan. Jumlah anggaran sebesar Rp.519.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 179.272.500,- atau 34.49%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 60.00%.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur. Jumlah anggaran sebesar Rp.149.305.150,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.56.132.475,- atau 37.60% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, hasil yang dicapai adalah Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK. Jumlah anggaran sebesar Rp.117.209.150,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.43.558.475,- atau 37.16%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 71,86% dan fisik proses triwulan II sebesar 80.00%.
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Jumlah anggaran sebesar Rp.12.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.425.000,- atau 28.19%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 90% dan fisik proses triwulan II sebesar 90.00%.
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah unit gedung yang direhab & luas gedung kantor yang dipelihara. Jumlah anggaran sebesar Rp.19.946.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.149.000,- atau 45.87%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 66,67% dan fisik proses triwulan II sebesar 90.00%.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 (empat) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.118.683.308.009,- dapat terealisasi sebesar Rp.16.892.242.567,- atau 14.24% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah tepat waktu. Jumlah Anggaran Rp.1.063.670.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.282.005.300,- atau 26.51% dan realisasi fisik 42,86% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok. Jumlah anggaran Rp.10.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 30.00%.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan. Jumlah anggaran Rp.11.115.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
 - c) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.29.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 30.00%.
 - d) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.18.725.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 25.00%.
 - e) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.3.875.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 100% dan fisik proses triwulan II sebesar 100.00%.
 - f) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.5.255.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
 - g) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan perbup tentang APBD. Jumlah anggaran Rp.502.375.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.265.084.400,-

atau 52.77%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.

- h) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan perbup tentang APBD. Jumlah anggaran Rp.474.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.920.900,- atau 3.57%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 3,57% dan fisik proses triwulan II sebesar 40.00%.
 - i) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, hasil yang dicapai adalah Jumlah standar biaya umum. Jumlah anggaran sebesar Rp.8.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 40.00%.
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah. Jumlah Anggaran sebesar Rp.121.254.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.27.000.400,- atau 22.27% dengan realisasi fisik 50% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen kas daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.15.033.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.599.850,- atau 17.29%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - b) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD. Jumlah anggaran sebesar Rp.16.860.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.679.950,- atau 21.83%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - c) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD pengelola Dana DAK. Jumlah anggaran sebesar Rp.10.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,- atau 22.54%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, hasil yang dicapai adalah Jumlah laporan. Jumlah anggaran sebesar Rp.23.290.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

- Rp.4.800.000,- atau 20.61%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
- e) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, hasil yang dicapai adalah Jumlah berita acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi. Jumlah anggaran sebesar Rp.23.255.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.600.000,- atau 19.78%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - f) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota, hasil yang dicapai adalah Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat Waktu. Jumlah anggaran sebesar Rp.32.166.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.920.600,- atau 27.73%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, hasil yang dicapai adalah Terlaksananya akuntansi dan tersusunnya pelaporan keuangan daerah yang disusun. Jumlah Anggaran sebesar Rp.261.030.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.64.417.400,- atau 24.68% dan realisasi Fisik 50% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, hasil yang dicapai adalah jumlah laporan keuangan yang akuntabel . Jumlah anggaran sebesar Rp.18.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.748.700,- atau 42.11%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - b) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis kabupaten . Jumlah anggaran sebesar Rp.38.925.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.624.800,- atau 29.86%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - c) Koordinasi Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran, hasil yang dicapai adalah jumlah laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.19.075.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.099.850,- atau 11.01%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 100% dan fisik proses triwulan II sebesar 100.00%.
 - d) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT. Jumlah anggaran sebesar Rp.113.350.000,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp.41.894.050,- atau 100.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100.00%.

- e) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai adalah Jumlah rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD & jumlah rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Jumlah anggaran sebesar Rp.27.480.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.050.000,- atau 3.82%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 80.00%.
 - f) Koordinasi, sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah pelaksanaan sidang majelis . Jumlah anggaran sebesar Rp.43.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 00.00%.
 - g) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.17.680.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 00.00%.
 - h) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota , hasil yang dicapai adalah Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangannya daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.13.940.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 00.00%.
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan kegiatan penunjang urusan. Jumlah Anggaran sebesar Rp.117.205.733.509,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.518.819.467,- atau 14.09% dan realisasi fisik sebesar 25% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket alokasi dana penyaluran bantuan keuangan. Jumlah anggaran sebesar Rp.112.509.612.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.518.819.467,- atau 14.68%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.

- b) Pengelolaan Dana Darurat, hasil yang dicapai adalah jumlah paket alokasi dana darurat dan mendesak. Jumlah anggaran sebesar Rp.2.113.580.939,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 00.00%.
- c) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai adalah jumlah paket alokasi dana bagi hasil Kabupaten/Kota . Jumlah anggaran sebesar Rp.2.582.540.470,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 00.00%.

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.800.435.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.63.633.200,- atau 7.95% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pencatatan asset yang tepat dan benar. Jumlah Anggaran Rp.800.435.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.63.633.200,- atau 7.95% dan realisasi fisik 50% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Standar Harga, hasil yang dicapai adalah Jumlah buku standarisasi harga satuan barang dan jasa. Jumlah anggaran Rp.56.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.400.000,- atau 2.47%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - b) Pengamanan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah Jumlah titik penjagaan. Jumlah anggaran Rp.336.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.428.600,- atau 11.14%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 60.00%.
 - c) Penilaian Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen penilaian asset daerah. Jumlah anggaran Rp.34.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.265.300,- atau 3.64%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 45.00%.
 - d) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, Pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. Jumlah anggaran Rp.70.115.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.

- e) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen barang milik daerah. Jumlah anggaran Rp.302.850.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.539.300,- atau 7.77%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 60% dan fisik proses triwulan II sebesar 60.00%.

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Terlaksananya program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 (satu) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.984.692.523,- dapat terealisasi sebesar Rp.513.004.619,- atau 52.10% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, hasil yang dicapai adalah Tercapainya target pajak dan retribusi daerah. Jumlah Anggaran Rp.991.542.523,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.513.004.619,- atau 51.74% dan realisasi fisik 51,74% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah peraturan perundang-undangan. Jumlah anggaran sebesar Rp.274.682.523,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.106.000.819,- atau 38.59%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 100% dan fisik proses triwulan II sebesar 100.00%.
 - b) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah pendampingan wajib pajak dan retribusi. Jumlah anggaran sebesar Rp.69.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.824.400,- atau 34.53%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 50% dan fisik proses triwulan II sebesar 50.00%.
 - c) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi. Jumlah anggaran sebesar Rp.368.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.321.262.200,- atau 87.25%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 100% dan fisik proses triwulan II sebesar 100.00%.
 - d) Penagihan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah persentase jumlah SPPT yang terdistribusi. Jumlah anggaran sebesar Rp.272.035.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.61.167.200,- atau 22.49%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 80% dan fisik proses triwulan II sebesar 80.00%.
 - e) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.6.850.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 0% dan fisik proses triwulan II sebesar 00.00%.

- f) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase capaian target retribusi daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.750.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik output sebesar 40% dan fisik proses triwulan II sebesar 40.00%.

Sampai pada Triwulan II Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 (revisi mendahului Perubahan) menunjukkan pencapaian kinerja realisasi Keuangan sebesar **17,02% (Sangat Rendah)** dan Realisasi Kinerja Fisik output sebesar **55.73% (Sangat Rendah)**. Pencapaian yang terbilang masih sangat rendah disebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid-19.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD pada Triwulan II Tahun 2021 dapat dinilai pencapaian kinerja sebagai berikut :

1) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Beberapa program/kegiatan/sub kegiatan belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan pertimbangan bahwa sub kegiatan tersebut memang tidak direncanakan untuk dilaksanakan hingga pada triwulan ke II. Adapun sub-sub kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan capaian fisik yang cukup baik, walaupun belum didukung oleh penyerapan anggaran yang seharusnya. Hal ini disebabkan pada saat pengukuran renja triwulan ke II dilakukan, pencairan dana untuk sub-sub kegiatan yang berkenaan masih dalam tahap proses verifikasi perbendaharaan.

Sub kegiatan yang diprediksi **Tidak Akan** memenuhi target adalah :

1. Penyusunan kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
2. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Kedua kegiatan tersebut telah mengalami refocusing anggaran secara keseluruhan, sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran 2021

2) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun beberapa sub kegiatan yang telah memenuhi target keluaran fisik 100% pada Triwulan II tahun 2021, antara lain :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 6. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 7. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 9. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 10. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 3) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Pada triwulan II evaluasi renja, sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan adalah pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pelaksanaan kegiatan Rapat luar dan dalam daerah yang ditargetkan sebanyak 260 kali, telah mencapai 287 kali. Hal ini yang menyebabkan adanya usulan penambahan kebutuhan anggaran pada Perubahan Renja 2021, disamping untuk membiayai perjalanan dinas yang belum terbayarkan, juga untuk membiayai perjalanan dinas yang akan dilaksanakan selanjutnya.
- 4) Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi target kinerja antara lain :
- a. Anggaran kas dan target pelaksanaan kegiatan memang tidak ditargetkan untuk dilaksanakan pada rentang waktu Bulan Januari s.d Juni 2021
 - b. Adanya refocusing anggaran
 - c. Adanya Pergeseran Anggaran Kas
 - d. Kurangnya anggaran yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan tersebut
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah
- Sub kegiatan yang tidak dilaksanakan akibat refocusing anggaran tidak cukup berimplikasi terhadap capaian program Renstra perangkat daerah, karena walaupun sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, target program akan tetap dapat dicapai.
- 6) Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor tersebut
- Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, diharapkan agar
- a. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun anggaran kas sub kegiatan setiap triwulannya
 - b. Lebih cermat dalam menentukan target sub kegiatan/kegiatan/program
 - c. Berkomitmen pada target yang telah ditentukan sebelumnya

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021
TRIWULAN II

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-				24,150,382,019										10,470,710,177		43.36%				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)					23	39,360,000	3		7						10	16,604,450	43.48%	42.19%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)					10	5,795,000	2	-	2	3,544,300					4	3,544,300	40.00%	61.16%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)					1	12,955,000	-	-	-	4,372,200					-	4,372,200	0.00%	33.75%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)					1	13,310,000	-	-	-	3,388,600					-	3,388,600	0.00%	25.46%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (Dokumen)					9	7,300,000	2	2,450,000	2	2,849,350					4	5,299,350	44.44%	72.59%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)					3	15,727,176,519	3		3						2	5,251,844,240	50.00%	33.39%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Asn yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)					107	15,605,873,519	107	1,939,941,028	107	3,275,134,512					107	5,215,075,540	100.00%	33.42%				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diventikasi (SPM)					1200	107,840,000	60	-	230	29,910,000					290	29,910,000	24.17%	27.74%				
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)					3	13,463,000	-	-	1	6,858,700					1	6,858,700	33.33%	50.94%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang terlaksana dengan baik (%)					1	2,054,353	-		-						-	-	0.00%	0.00%				
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi (objek retribusi) (Jenis)					2	2,054,353	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya (ASN)					107	39,200,000	107		107						54	12,699,950	50.00%	32.40%				
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (Dokumen)					7	39,200,000	2	-	2	12,699,950					4	12,699,950	57.14%	32.40%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)					6	881,338,970	6		6						3	364,009,150	50.00%	41.30%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)					2	15,523,500	2	-	2	5,198,000					1	5,198,000	50.00%	33.48%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)					3	133,565,000	3	-	3	68,280,000					2	68,280,000	50.00%	51.12%				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)					5200	322,182,500	1,000	-	1,700	87,323,750					2,700	87,323,750	51.92%	27.10%				
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)					3	248,699,370	3	-	3	110,088,000					2	110,088,000	50.00%	44.27%				
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)					600	16,250,000	200	-	370	10,150,000					570	10,150,000	95.00%	62.46%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya (kali)					280	145,118,600	90	-	190	82,969,400					280	82,969,400	100.00%	57.17%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)					26	270,100,000	-		26						26	268,774,000	100.00%	99.51%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)					0	270,100,000	-	-	26	268,774,000					26	268,774,000	100.00%	99.51%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)					3	7,041,847,027	2		2						1	2,384,709,956	33.33%	33.86%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman (kali)					89	10,000,000	20	-	25	909,000					45	909,000	50.56%	9.09%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik (kali)					36	6,512,047,027	36	882,892,781	36	1,321,635,675					18	2,204,528,456	50.00%	33.85%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)					2	519,800,000	2	-	2	179,272,500					1	179,272,500	50.00%	34.49%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)					337	149,305,150	80		140						220	56,132,475	65.28%	37.60%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (unit radis roda 2)					295	117,209,150	100	-	112	43,558,475					212	43,558,475	71.86%	37.16%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)					20	12,150,000	15	-	3	3,425,000					18	3,425,000	90.00%	28.19%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang direhab (unit)					3	19,946,000	1		1	9,149,000					2	9,149,000	66.67%	45.87%				
			Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)					320		100		110						210		65.63%					
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		83.19%	34.59%				
																		Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		KEUANGAN																							
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			-				118,651,688,009										16,892,242,567		14.24%				
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terkoordinasi dan tersusun (%)					7	1,063,670,000	1		2						3	282,005,300	42.86%	26.51%				
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok (Dokumen)					1	10,550,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan (dokumen KUA-PPAS)					1	11,115,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%				
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang diasistensi (SKPD)					34	29,225,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%				
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang diasistensi (SKPD)					34	18,725,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%				
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang diasistensi (SKPD)					34	3,875,000	34	-	-	-	-				34	-	100.00%	0.00%				
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang diasistensi (SKPD)					34	5,255,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Perbub tentang APBD (Dokumen)					2	502,375,000	-	-	-	265,084,400					-	265,084,400	0.00%	52.77%				
			Jumlah Peserta Sosialisasi (Laki-laki & Perempuan)					100	-	-	-	-						-		0.00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)							
							I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Peraturan Daerah dan Perbub tentang Perubahan APBD (Dokumen)					2	474,000,000	-	-		16,920,900					-	16,920,900	0.00%	3.57%				
			Jumlah Peserta Sosialisasi (Laki-laki & Perempuan)					100	-	-	-							-		0.00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah standar biaya umum (standar biaya umum)					1	8,550,000	1	-	-	-					1	-	100.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase perbendaharaan daerah yang terkoordinasi dan terkelola (%)					100	121,254,500	100		100						50	27,000,400	50.00%	22.27%				
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah (Dokumen)					4	15,033,000	4	-	4	2,599,850					2	2,599,850	50.00%	17.29%				
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)					2	16,860,000	2	-	2	3,679,950					1	3,679,950	50.00%	21.83%				
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK (SKPD)					9	10,650,000	9	-	9	2,400,000					5	2,400,000	50.00%	22.54%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan (Dokumen)					6	23,290,000	6	-	6	4,800,000					3	4,800,000	50.00%	20.61%				
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas Pelaksanaan Rekonsiliasi (Berita Acara)					6	23,255,000	6	-	6	4,600,000					3	4,600,000	50.00%	19.78%				
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu (%)					100	32,166,500	100	-	100	8,920,600					50	8,920,600	50.00%	27.73%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)					100	261,030,000	100		100						50	64,417,400	50.00%	24.68%				
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel (Laporan)					2	18,400,000	1		-	-	7,748,700				1	7,748,700	50.00%	42.11%				
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten (Laporan)					2	38,925,000	-		-	1	11,624,800				1	11,624,800	50.00%	29.86%				
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)					1	19,075,000	1		-	-	2,099,850				1	2,099,850	100.00%	11.01%				
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang tekonsolidasi UN AUDIT (Dokumen)					1	113,350,000	1		-	-	41,894,050				1	41,894,050	100.00%	36.96%				
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan)					1	27,480,000			-	-	1,050,000				-	1,050,000	0.00%	3.82%				
			Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan)					1				-	-					-		0.00%					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kali sidang)					4	43,800,000	-		-	-	-				-	-	0.00%	0.00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)			
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan temtang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PERPU)			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Dibina Pengelolaaan Keuangan Daerah (Desa)			49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Belanja Keuangan Daerah yang berdasarkan kewenangan (%)			100	117,205,733,509	50		50						25	16,518,819,467	25.00%	14.09%								
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan (Paket)			1	112,509,612,100	1	2,684,140,000	1	13,834,679,467					1	16,518,819,467	50.00%	14.68%								
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak (Paket)			1	2,113,580,939	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%								
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (Paket)			1	2,582,540,470	1	-	1	-					1	-	50.00%	0.00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												48.70%	14.24%				
										Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)			
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			-				984,692,523										513,004,619		52.10%						
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah (%)					100	984,692,523	14		38						52	513,004,619	51.74%	52.10%						
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)					1	274,682,523	1	-	-	106,000,819					1	106,000,819	100.00%	38.59%						
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi (kali)					8	69,000,000	8	-	8	23,824,400					4	23,824,400	50.00%	34.53%						
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi (Dokumen)					3	368,225,000	1	-	2	321,262,200					3	321,262,200	100.00%	87.25%						
		Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)					100	272,035,000	30	-	50	61,167,200					80	61,167,200	80.00%	22.49%						
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Dokumen)					1	-	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%						
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah (%)					100	750,000	22	-	40	750,000					40	750,000	40.11%	100.00%						
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		90.93%	52.10%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah						
								144,587,197,551		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										54.79%		17.86%					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Rendah		Sangat Rendah					
No.	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA																									
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi																									
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi																									
(3)	66% ≤ 75%	Sedang																									
(4)	51% ≤ 65%	Rendah																									
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah																									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021, dapat di lihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah dengan beberapa aspek:

1. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang di fokuskan pada penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun yaitu Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun.
2. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil yang difokuskan pada penyerapan dana perimbangan dibandingkan dengan dana perimbangan yang direncanakan.
3. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD yang di fokuskan pada besaran PAD.
4. Keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah keuangan yaitu melalui ketepatan waktu penetapan Perda APBD, tersedianya Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tersedianya anggaran belanja untuk pelayanan dasar.
5. Efektivitas perencanaan, penyusunan pelaksanaan tata usaha pertanggungjawaban dan pengawasan APBD yang difokuskan pada kewajaran Laporan Keuangan melalui opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Rasio Silpa terhadap total pendapatan.
6. Pengelolaan Potensi Daerah yang difokuskan pada Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD, Peningkatan PAD dari Tahun sebelumnya.

Beberapa aspek tersebut di atas dirinci dalam tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kerja Pelayanan SKPD

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

NO	Indikator	Target SPM/IKK/Standar Nasional/Internasional	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Tujuan)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK
	Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas (Sasaran)	Penyampaian rencana kerja anggaran OPD, Laporan Keuangan, dan Pelaporan Aset	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Surat Edaran Bupati Soppeng tentang Penyusunan RKA dan Laporan Keuangan Daerah
2	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tujuan)	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hasil Penilaian Aparatur yang berkinerja sangat baik
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Sasaran)	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rata-Rata Capaian IKU Perangkat Daerah

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan kapasitas peran dan fungsinya yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan strategis, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng perlu mengidentifikasi faktor internal yang menyangkut kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang menyangkut peluang dan ancaman, sehingga upaya mengatasinya dibutuhkan adanya koordinasi dan kerja sama yang intensif dengan berbagai komponen, instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota maupu kecamatan, kelurahan/desa.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tetap mempertimbangkan Isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah povinsi maupun pemerintah pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor external dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Berbagai Kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dimaksud antara lain dapat diidentifikasi dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor internal :

a. Kekuatan :

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng satu – satunya komponen unit kerja SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.
- Tersedianya dukungan tenaga pejabat stuktural serta pejabat fungsional umum yang dapat diberdayakan untuk merespon perubahan kondisi dan meningkatkan kompetensi dan kinerja SKPD.
- Tersedianya dukungan anggaran yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dan fungsi SKPD.

b. Kelemahan :

- Masih ditemukannya pejabat struktural dan Fungsional Umum yang kurang professional dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya.
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas pejabat fungsional umum yang ditempatkan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang khususnya perangkat teknologi informasi dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

2. Faktor Eksternal.

a. Peluang :

- Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.
- Adanya tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan Pelayanan,
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Diberlakukannya sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan

b. Ancaman :

- Kesadaran Wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah dalam melunasi tagihan pajak dan retribusinya.
- Pemberlakuan undang-undang yang membatasi jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang berdampak pada penurunan realisasi PAD.
- Pemotongan dana transfer dari pusat akibat penanganan Pandemi Nasional Bencana Non Alam Covid 19

Dari uraian faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan di rumuskan isu –isu strategis yang dikelompokkan dengan urusan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan aset/barang daerah (terutama inventarisasi dan pengadministrasian) masih di temukan kelemahan sehingga perlu di lakukan berbagai upaya mendorong optimalisasinya, baik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng maupun di SKPD lainnya.

Hal tersebut menjadi masalah krusial karena pengelolaan aset/barang daerah telah menjadi bagian audit substantif BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu dukungan kebijakan melalui regulasi daerah dan komitmen bersama dari semua SKPD dilingkup Pemda Kabupaten Soppeng.

2. Pemanfaatan kekayaan daerah belum optimal untuk meningkatkan PAD Kabupaten Soppeng dan regulasi berupa peraturan Daerah yang ada sebagai dasar hukum pemanfaatan kekayaan daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut.
3. Dalam pengelolaan Pendapatan daerah masih di temukan Wajib Pajak yang masih rendah kesadarannya untuk membayar pajak dan belum optimalnya pemungutan atas potensi pajak yang ada. Mendasari hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya secara terus menerus peningkatan kesadaran wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan

dukungan regulasi daerah sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Data Piutang PBB yang diserahkan dari pusat ke daerah melalui KPP Pratama Watanpone belum valid.
5. Penerimaan PAD Kabupaten Soppeng belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD. Oleh karena itu perlu untuk menggali potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi dengan tetap memperhatikan kondisi yang tidak terlalu membebani masyarakat.
6. Belum terintegrasikannya aplikasi SIAKD, SISMIOP, PBB, Aplikasi pendapatan daerah dan Aplikasi barang daerah ke dalam satu system. Oleh karena itu perlu dilakukan pengoptimalan semua fungsi yang ada pada aplikasi melalui baik dengan cara perpindahan/ migrasi pemanfaatan system ataupun kostomisasi aplikasi untuk mendorong tercapainya kesatuan aplikasi system tersebut guna memperoleh hasil integritas sistem yang memadai.

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap Tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah, Provinsi, maupun Nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan. Kedepan diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng memiliki tenaga fungsional di bidang perencanaan yang akan berperan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

2.4 . Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Tahun 2021 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan Tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2021.

Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2026. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan

rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program-program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2026 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang di tetapkan.

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2021
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	KEUANGAN				145,288,953,418	KEUANGAN				145,288,953,418			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20,085,389,930	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20,085,389,930	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45,860,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45,860,000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100 %	7,795,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100 %	7,795,000			
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen RKA yang disusun	100 %	12,955,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen RKA yang disusun	100 %	12,955,000			
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	100 %	13,310,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	100 %	13,310,000			
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	100 %	11,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	100 %	11,800,000			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10,962,197,452	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10,962,197,452	
05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	100 %	10,840,894,452	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	100 %	10,840,894,452			
06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SPM yang diverifikasi	100 %	107,840,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SPM yang diverifikasi	100 %	107,840,000			
07	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	100 %	13,463,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	100 %	13,463,000			
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					13,083,181	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					13,083,181	
08	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Pengelola Retribusi Daerah	100 %	13,083,181	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Pengelola Retribusi Daerah	100 %	13,083,181			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				39,200,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				39,200,000	
09	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen kepegawaian	100 %	39,200,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen kepegawaian	100 %	39,200,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,086,818,570	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,086,818,570	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	100 %	15,523,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	100 %	15,523,500	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah paket bahan logistik kanto	100 %	205,140,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah paket bahan logistik kanto	100 %	205,140,000	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	323,512,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	323,512,500	
13	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	100 %	208,699,370	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	100 %	208,699,370	
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah tamu yg difasilitasi	100 %	24,925,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah tamu yg difasilitasi	100 %	24,925,000	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	309,018,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	309,018,200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				485,400,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				485,400,000	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	100 %	150,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	100 %	150,000,000	
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pengadaan Sumur Bor	100 %	335,400,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pengadaan Sumur Bor	100 %	335,400,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,183,721,057	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,183,721,057	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Paket Pengiriman	100 %	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Paket Pengiriman	100 %	10,000,000	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik	100 %	6,653,921,057	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik	100 %	6,653,921,057	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	100 %	519,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	100 %	519,800,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				269,109,670	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				269,109,670	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK	100 %	167,013,670	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK	100 %	167,013,670	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 %	12,150,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 %	12,150,000	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Jumlah unit gedung yang di rehabilitasi	100 %	89,946,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Jumlah unit gedung yang di rehabilitasi	100 %	89,946,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				122,542,396,643	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				122,542,396,663	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1,138,220,012	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1,138,220,022	
24	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dengan KUA-PPAS Pokok	100 %	21,450,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dengan KUA-PPAS Pokok	100 %	21,450,000	
25	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program Perubahan RKPD dengan KUA-PPAS Perubahan	100 %	27,290,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program Perubahan RKPD dengan KUA-PPAS Perubahan	100 %	27,290,000	
26	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen RKA- SKPD yang terverifikasi sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Juknis)	100 %	36,225,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen RKA-SKPD yang terverifikasi sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Juknis)	100 %	36,225,000	
27	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen RKA- P SKPD yang terverifikasi sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA-Perubahan SKPD (Juknis)	100 %	36,225,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen RKA-P SKPD yang terverifikasi sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA-Perubahan SKPD (Juknis)	100 %	36,225,000	
28	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen DPA SKPD yang terverifikasi dan tervalidasi untuk disahkan	100 %	3,875,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen DPA SKPD yang terverifikasi dan tervalidasi untuk disahkan	100 %	3,875,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen DPA-Perubahan SKPD yang terverifikasi dan tervalidasi untuk disahkan	100 %	5,255,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen DPA-Perubahan SKPD yang terverifikasi dan tervalidasi untuk disahkan	100 %	5,255,000	
30	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang APBD Persentase Program Ranperda- Ranperbub APBD yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda APBD dan Perbup APBD	100 %	512,350,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang APBD Persentase Program Ranperda- Ranperbub APBD yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda APBD dan Perbup APBD	100 %	512,350,000	
31	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang penjabaran Perubahan APBD Jumlah pes Persentase Program Ranperda-Ranperbub APBD-P yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda APBD-P dan Perbup APBD-P	100 %	482,750,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang penjabaran Perubahan APBD Jumlah pes Persentase Program Ranperda-Ranperbub APBD-P yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda APBD-P dan Perbup APBD-P	100 %	482,750,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Standar Biaya Umum Persentase keabsahan biaya dalam penyusunan RKA-SKPD, yang berdasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU)	100 %	12,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Standar Biaya Umum Persentase keabsahan biaya dalam penyusunan RKA-SKPD, yang berdasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU)	100 %	12,800,000	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					130,054,506	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				130,054,511	
33	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Kas Daerah Persentase ketersediaan dana transaksi harian daerah	100 %	18,533,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Kas Daerah Persentase ketersediaan dana transaksi harian daerah	100 %	18,533,000	
34	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD Persentase ketersediaan dan kecukupan anggaran kas daerah terhadap rencana penarikan anggaran setiap periode	100 %	16,860,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD Persentase ketersediaan dan kecukupan anggaran kas daerah terhadap rencana penarikan anggaran setiap periode	100 %	16,860,000	
35	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem	100 %	15,950,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem	100 %	15,950,000	
36	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Persentase kelancaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	23,290,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Persentase kelancaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	23,290,000	
37	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	100 %	23,255,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	100 %	23,255,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase pengujian dan pengkajian kebenaran kelengkapan dokumen SPM SKPD Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	100 %	32,166,500	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase pengujian dan pengkajian kebenaran kelengkapan dokumen SPM SKPD Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	100 %	32,166,500	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					283,175,006	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				283,175,011	
39	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel Persentase penyajian laporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang sesuai PSAP dan akuntabel	100 %	18,400,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel Persentase penyajian laporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang sesuai PSAP dan akuntabel	100 %	18,400,000	
40	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten Persentase penyajian laporan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban yang jujur dan dapat diverifikasi	100 %	43,125,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten Persentase penyajian laporan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban yang jujur dan dapat diverifikasi	100 %	43,125,000	
41	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disusun Persentase implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	24,325,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disusun Persentase implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	24,325,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT Ratio pemenuhan entitas akuntansi keuangan	100 %	113,350,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT Ratio pemenuhan entitas akuntansi keuangan	100 %	113,350,000	
43	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD	100 %	40,175,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD	100 %	40,175,000	
44	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis Persentase Kasus Kerugian daerah yang dapat terselesaikan dengan baik	100 %	43,800,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis Persentase Kasus Kerugian daerah yang dapat terselesaikan dengan baik	100 %	43,800,000	
45	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100 %	0	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100 %	0	
46	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Terlaksananya akuntansi dan tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	100 %	0	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Terlaksananya akuntansi dan tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	100 %	0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				120,990,947,119	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				120,990,947,119	
47	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah	100 %	1,471,926,699	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah	100 %	1,471,926,699	
48	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase Pembayaran Cicilan pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	100 %	1,933,087,777	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase Pembayaran Cicilan pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	100 %	1,933,087,777	
49	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan Persentase pengalokasian TKDD dan DD yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	100 %	112,897,797,112	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan Persentase pengalokasian TKDD dan DD yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	100 %	112,897,797,112	
50	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak Persentase pengalokasian dan pemenuhan kebutuhan dana tanggap darurat dan mendesak	100 %	2,113,580,939	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak Persentase pengalokasian dan pemenuhan kebutuhan dana tanggap darurat dan mendesak	100 %	2,113,580,939	
51	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Persentase pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	100 %	2,574,554,592	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Persentase pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	100 %	2,574,554,592	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					Pengelolaan Barang Milik Daerah					
52	Penyusunan Standar Harga	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Persentase keabsahan data harga dalam penyusunan RKA-SKPD, yang berdasarkan pada Standar Satuan Harga (SSH)	100 %	56,650,000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Persentase keabsahan data harga dalam penyusunan RKA-SKPD, yang berdasarkan pada Standar Satuan Harga (SSH)	100 %	56,650,000	
53	Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Pemda Jumlah Titik Penjagaan Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	385,020,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Pemda Jumlah Titik Penjagaan Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	385,020,000	
54	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah Ratio kewajaran Nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemda	100 %	104,800,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah Ratio kewajaran Nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemda	100 %	104,800,000	
55	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Persentase keterpenuhan pencatatan mutasi	100 %	70,115,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Persentase keterpenuhan pencatatan mutasi	100 %	70,115,000	
56	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dolumen Barang Milik Daerah Jumlah Informasi yang relevan, transparan dan akuntabel terkait Barang Milik Daerah	100 %	303,550,000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dolumen Barang Milik Daerah Jumlah Informasi yang relevan, transparan dan akuntabel terkait Barang Milik Daerah	100 %	303,550,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,491,681,869	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				1,491,681,869	
57	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peraturan Perundang-Undangan Persentase ketersediaan Regulasi tentang Pajak Daerah	100 %	406,556,869	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peraturan Perundang-Undangan Persentase ketersediaan Regulasi tentang Pajak Daerah	100 %	406,556,869	
58	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	100 %	69,000,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	100 %	69,000,000	
59	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang digunakan dengan baik	100 %	279,500,000	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang digunakan dengan baik	100 %	279,500,000	
60	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Basis data bangunan obyek Pajak dan Retribusi	100 %	369,975,000	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Basis data bangunan obyek Pajak dan Retribusi	100 %	369,975,000	
61	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	319,700,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	319,700,000	
62	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	46,200,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	46,200,000	
63	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase capaian target retribusi daerah	100 %	750,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase capaian target retribusi daerah	100 %	750,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UPT KECAMATAN LALABATA				40,335,000	UPT KECAMATAN LALABATA				40,335,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				22,225,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				22,225,000	
64	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
65	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	10,710,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	10,710,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				18,110,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				18,110,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				18,110,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				18,110,000	
67	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	18,110,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	18,110,000	
	UPT KECAMATAN DONRI-DONRI				29,045,000	UPT KECAMATAN DONRI-DONRI				29,045,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				15,935,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				15,935,000	
68	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Donri, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Donri, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
69	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Donri, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Donri, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
70	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Donri, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4,420,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Donri, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4,420,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				13,110,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				13,110,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				13,110,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				13,110,000	
71	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Donri, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	13,110,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Donri, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	13,110,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UPT KECAMATAN LILIRIAJA				32,075,000	UPT KECAMATAN LILIRIAJA				32,075,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17,465,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17,465,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				17,465,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				17,465,000	
72	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
73	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
74	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5,950,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5,950,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				14,610,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				14,610,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				14,610,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				14,610,000	
75	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	14,610,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	14,610,000	
	UPT KECAMATAN LILIRILAU				35,945,000	UPT KECAMATAN LILIRILAU				35,945,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,335,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,335,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				19,335,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				19,335,000	
76	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
77	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
78	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	7,820,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	7,820,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				16,610,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				16,610,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				16,610,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				16,610,000	
79	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	16,610,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	16,610,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UPT KECAMATAN MARIORIAWA				30,225,000	UPT KECAMATAN MARIORIAWA				30,225,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16,615,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16,615,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				16,615,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				16,615,000	
80	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
81	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
82	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5,100,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5,100,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				13,610,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				13,610,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				13,610,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				13,610,000	
83	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	13,610,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	13,610,000	
	UPT KECAMATAN MARIORIWAWO				27,495,000	UPT KECAMATAN MARIORIWAWO				27,495,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,505,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,505,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				19,505,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				19,505,000	
84	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
85	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
86	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	7,990,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	7,990,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				17,110,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				17,110,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				17,110,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				17,110,000	
87	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	6 %	17,110,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	6 %	17,110,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UPT KECAMATAN GANRA				28,205,000	UPT KECAMATAN GANRA				28,205,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15,595,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15,595,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				15,595,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				15,595,000	
88	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
89	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
90	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4,080,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4,080,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				12,610,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				12,610,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				12,610,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				12,610,000	
91	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	12,610,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	12,610,000	
	UPT KECAMATAN CITTA				26,025,000	UPT KECAMATAN CITTA				26,025,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14,915,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14,915,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				14,915,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				14,915,000	
92	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
93	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
94	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	3,400,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	3,400,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				11,110,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				11,110,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				11,110,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				11,110,000	
95	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	11,110,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	11,110,000	

2.5 Penelaah program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah adalah lembaga Teknis yang mengelola penerimaan, keuangan, dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selain berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga selaku Pejabat Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam kurun waktu Tahun 2021 dalam rangka menciptakan system dan prosudur yang ideal dalam pengelolaan keuangan daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Berpedoman pada rancangan penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mengacu pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2026 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen rancangan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2021. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen – dokumen perencanaan yang ada renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada Tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Desa Gattareng Toa	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	2 Unit	Telah diakomodir pada Perubahan renja sebanyak 6 unit Kendaraan Operasional Roda Dua
2	Belanja Tidak Langsung Bantuan Dana Hibah Masjid Babussalam, Al-ikhwan, Nurul Yaqin Desa Baringeng, Masjid sabilul Mu-minin,Hidayatullah Kel. Ujung, dan Mesjid Imanullah Lemo - Lemo,E	Desa Baringeng Kel. Ujung dan Desa Masing	Jumlah Bantuan Hibah	6 Paket	Disetujui tetapi untuk Tahun 2021 sudah tidak terdapat pada Sub kegiatan Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
3	Belanja Tidak Langsung Bantuan Dana Hibah Ormas KTNA dan Karang Taruna Kab. Soppeng	Soppeng	Jumlah Bantuan Hibah	2 Paket	Disetujui tetapi untuk Tahun 2021 sudah tidak terdapat pada Sub kegiatan Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Terhadap pemangku kepentingan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng senantiasa melaksanakan fungsi sebagai pengelola keuangan dan pendapatan asli daerah yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan piranti pendukung pengelolaan keuangan yang memadai sehingga mampu berkontribusi dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berpredikat **Wajar Tanpa Pengecualian** .

B A B III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang disusun pada Tahun 2021 yang dituangkan dalam perubahan Renja 2021 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi

Secara umum program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terdiri 7 kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terdiri 4 kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** terdiri 1 kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** terdiri 1 kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target		
502		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
502		KEUANGAN										150,528,771,196	145,039,603,418				150,630,278,603			
5021		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										28,120,309,264	20,085,389,930				27,759,324,264			
5021	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										50,130,000	45,860,000				50,140,000			
5021	2.011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalasui Daerah yang sesuai regulasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	10 dokumen	10 dokumen	100 %	100 %	7,795,000	7,795,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	7,800,000		
5021	2.012	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalasui Daerah yang sesuai regulasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	14,705,000	12,955,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	14,710,000		
5021	2.013	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalasui Daerah yang sesuai regulasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	15,830,000	13,310,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	15,830,000		
5021	2.016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalasui Daerah yang sesuai regulasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	9 dokumen	9 dokumen	100 %	100 %	11,800,000	11,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	11,800,000		
5021	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										19,731,048,764	10,962,197,452				19,708,656,376			
5021	2.021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persensatase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)	Persentase Keterpenuhihan Dokumen Pelaporan Keuangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	107 ASN	107 ASN	100 %	100 %	19,599,245,764	10,840,894,452	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persensatase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	19,576,853,376		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja						
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Targe t					
5	0	2	1	2	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Persensatase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	jumlah SPM yang diverifikasi	Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	1200 SPM	1200 SPM	100 %	100 %	118,340,000	107,840,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persensatase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	118,340,000
5	0	2	1	2	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persensatase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuanga (Laporan Keuangan Bulanan/Semester) yang disusun	Persentase nKeterpenuhan Dokumen nPelaporan Keuangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	13,463,000	13,463,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persensatase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	13,463,000
5	0	2	1	2	0	2	0	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										2,054,353	13,083,181				2,054,353	
5	0	2	1	2	0	2	0	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah objek retribusi	Persentase keterpenuhan sumber daya pengelola retribusi daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Obyek	2 Obyek	100 %	100 %	2,054,353	13,083,181	Retribusi	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	2,054,353
5	0	2	1	2	0	2	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										39,200,000	39,200,000				39,000,000	
5	0	2	1	2	0	2	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase peningkatan kedisiplina aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian	Persentase peningkatan kedisiplinan sumber daya aparatur	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	39,200,000	39,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	persentase peningkatan kedisiplina aparatur	100 %	39,000,000
5	0	2	1	2	0	2	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										829,723,970	1,086,818,570				830,234,570	
5	0	2	1	2	0	2	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	15,523,500	15,523,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	15,575,000
5	0	2	1	2	0	2	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah paket bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	143,565,000	205,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	143,640,000
5	0	2	1	2	0	2	0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	52000 Lembar	52000 Lembar	100 %	100 %	312,862,500	323,512,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	312,862,500
5	0	2	1	2	0	2	0	7	Penyediaan Bahan/Materi al	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	168,699,370	208,699,370	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	168,702,070
5	0	2	1	2	0	2	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah tamu yg difasilitasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	600 orang	600 orang	100 %	100 %	20,425,000	24,925,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	20,425,000
5	0	2	1	2	0	2	0	9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kedinasan lainnya (Kali)	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	280 kali	280 kali	100 %	100 %	168,648,600	309,018,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	169,030,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
50217		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										270,100,000	485,400,000					441,000,000		
50217	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		Persentase keterpenuhan peralatan dan mesin kantor		100 %	100 %			100 %	100 %	0	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100 %	150,000,000		
50217	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakanJumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase keterpenuhan peralatan dan mesin kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	26 Unit	28 Unit	100 %	100 %	270,100,000	335,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	291,000,000		
50218		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										7,041,847,027	7,183,721,057					6,531,440,465		
50218	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pengiriman	Terpenuhihnya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	89 kali	89 kali	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000		
50218	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (kali)	Terpenuhihnya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 kali	36 kali	100 %	100 %	6,512,047,027	6,653,921,057	Pajak Peneranga Jalan	n	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	6,001,640,465		
50218	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	Terpenuhihnya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	519,800,000	519,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	519,800,000		
50219		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										156,205,150	269,109,670					156,798,500		
50219	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK	Terpenuhihnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	295 Unit Randis roda 2	4 Unit Roda 4 295 Unit Randis roda 2	100 %	100 %	117,209,150	167,013,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	117,298,500		
50219	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terpenuhihnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	39 Unit	20 Unit	100 %	100 %	19,050,000	12,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	19,500,000		
50219	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah unit gedung yang di rehab Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	Terpenuhihnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	3 unit 320 m2	3 unit 320 m2	100 %	100 %	19,946,000	89,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	20,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan											
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										120,599,669,409	122,542,396,619				121,020,086,816				
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										1,063,670,000	1,138,220,000				1,063,670,000				
5	0	0	2	2	1	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dengan KUA- PPAS Pokok	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	1 dokumen KUA-PPAS	1 dokumen KUA-PPAS 100 %	100 %	100 %	10,550,000	21,450,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah	100 %	10,550,000
5	0	0	2	2	1	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program Perubahan RKPD dengan KUA- PPAS Perubahan	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	1 dokumen KUA-PPAS	1 dokumen KUA-PPAS 100 %	100 %	100 %	11,115,000	27,290,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	11,115,000
5	0	0	2	2	1	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen RKA- SKPD yang terverifikasi sesuai dengan Pedoman Penyusunan/Juknis RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	34 SKPD	34 SKPD 100 %	100 %	100 %	29,225,000	36,225,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	29,225,000
5	0	0	2	2	1	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen RKA-P SKPD yang terverifikasi sesuai dengan Pedoman Penyusunan/Juknis RKA-Perubahan SKPD	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	34 SKPD	34 SKPD 100 %	100 %	100 %	18,725,000	36,225,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	18,725,000
5	0	0	2	2	1	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen DPA-Perubahan SKPD yang terverifikasi dan tervalidasi untuk disah-kan	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	34 SKPD	34 SKPD 100 %	100 %	100 %	3,875,000	3,875,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	3,875,000
5	0	0	2	2	1	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen DPA-Perubahan SKPD yang terverifikasi dan tervalidasi untuk disah-kan	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	34 SKPD	34 SKPD 100 %	100 %	100 %	5,255,000	5,255,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah	100 %	5,255,000
5	0	0	2	2	1	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Perbup Tentang APBD Persentase Program Ranperda-Ranperbub APBD yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda APBD dan Perbup APBD	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 100 %	100 %	100 %	502,375,000	512,350,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	502,375,000
5	0	0	2	2	1	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Persentase Program Ranperda-Ranperbub APBD-P yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda APBD-P dan Perbup APBD-P	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 100 %	100 %	100 %	474,000,000	482,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	474,000,000
5	0	0	2	2	1	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Standar Biaya Umum Persentase keabsahan biaya dalam penyusunan RKA-SKPD, yang berdasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU)	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	1 Standar Biaya Umum	1 Standar Biaya Umum 100 %	100 %	100 %	8,550,000	12,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	8,550,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
					Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target						
					Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah		
5022	002	202		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								121,254,500		130,054,500		121,254,500					
5022	002	201		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Kas Daerah Persentase ketersediaan dana transaksi harian daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen 100 %	100 %	100 %	15,033,000	18,533,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah	100 %	15,033,000	
5022	002	203		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD Persentase ketersediaan dan kecukupan anggaran kas daerah terhadap rencana penarikan anggaran setiap periode	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 100 %	100 %	100 %	16,860,000	16,860,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	16,860,000	
5022	002	205		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	9 SKPD	9 SKPD	100 %	100 %	10,650,000	15,950,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	10,650,000	
5022	002	207		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Persentase kelancaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 100 %	100 %	100 %	23,290,000	23,290,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	23,290,000	
5022	002	209		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	6 Berita Acara	6 Berita Acara	100 %	100 %	23,255,000	23,255,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	23,255,000	
5022	002	211		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Persentase pengujian dan pengkajian kebenaran kelengkapan dokumen SPM SKPD Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	32,166,500	32,166,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	32,166,500	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Tolok Ukur										
				Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target						
50223	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												292,650,000	283,175,000						
5022301	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel Persentase penyajian laporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang sesuai PSAP dan akuntabel	Terlaksananya Akuntansi dan tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan 100 %	100 %	100 %	18,400,000	18,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	18,400,000			
5022302	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten Persentase penyajian laporan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban yang jujur dan dapat diverifikasi	Terlaksananya Akuntansi dan tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan 100 %	100 %	100 %	38,925,000	43,125,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	38,925,000			
5022303	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung awaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Akuntansi dan tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan 100 %	100 %	100 %	19,075,000	24,325,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	19,075,000			
5022304	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT Ratio pemenuhan entitas akuntansi keuangan	Terlaksananya Akuntansi dan tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen 100 %	100 %	100 %	113,350,000	113,350,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	113,400,000			
5022305	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawab APBD yang disetujui dan disahkan untu menjadi Perda dan Perbup Pertanggungjawab APBD	Terlaksananya Akuntansi dan tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	1 Laporan	2 Dokumen	100 %	100 %	27,480,000	40,175,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	27,480,000			
5022307	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis Persentase Penyelesaian kerugian daerah	Terlaksananya Akuntansi dan tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	4 kali sidang	4 kali sidang 100 %	100 %	100 %	43,800,000	43,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah	100 %	43,805,000			
5022309	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang - undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya Akuntansi dan tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	1 PERPU	1 PERPU	100 %	100 %	17,680,000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah	100 %	17,680,000			
5022311	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungj awaban Pemerintah Kabupaten/Ko ta	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Desa yang dibina Pengelolaan Keuangannya Daerah	Terlaksananya Akuntansi dan tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	49 Desa	49 Desa	100 %	100 %	13,940,000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah	100 %	13,940,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
50224		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										119,122,094,909	120,990,947,119				119,542,457,316				
502243	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Persentase pelaksanaan penerimaan Pinjaman Pemenintah Daerah	Persentase Keterpenuhan kegiatan Penunjang Urusan		100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	0	1,471,926,699	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan	100 %	1,471,926,699				
502244	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Persentase pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemenintah Daerah	Persentase Keterpenuhan kegiatan Penunjang Urusan		100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	0	1,933,087,777	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah	100 %	1,933,087,777				
502248	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan Persentase pengalokasian TKDD dan DD yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	Persentase Keterpenuhan kegiatan Penunjang Urusan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket 100 %	100 %	100 %	114,425,973,500	112,897,797,112	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	112,537,684,100				
502249	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak Persentase pengalokasian dan pemenuhan kebutuhan dana tanggap darurat dan mendesak	Persentase Keterpenuhan kegiatan Penunjang Urusan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket 100 %	100 %	100 %	2,113,580,939	2,113,580,939	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	1,017,218,270				
502240	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Ko ta	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Persentase pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	Persentase Keterpenuhan kegiatan Penunjang Urusan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket 100 %	100 %	100 %	2,582,540,470	2,574,554,592	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	100 %	2,582,540,470				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
502023	00	00			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											900,435,000	920,135,000			892,260,000			
502023	00	2.0	23	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah											900,435,000	920,135,000			892,260,000			
502023	00	2.0	23	11	Penyusunan Standar Harga	% SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Persentase keabsahan data harga dalam penyusunan RKA-SKPD, yang berdasarkan pada Standar Satuan Harga (SSH)	Tersedianya dokumen pencatatan aset yang tepat dan benar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	2 Buku	2 Buku 100 %	100 %	100 %	56,650,000	56,650,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	100 %	56,650,000		
502023	00	2.0	23	17	Pengamanan Barang Milik Daerah	% SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	Jumlah Aset Pemda Jumlah Titik Penjagaan Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen pencatatan aset yang tepat dan benar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng,	100 %	100 %	50 Aset PEMPDA 1 Titik Penjagaan	50 Aset PEMPDA 1 Titik Penjagaan 100 %	100 %	100 %	436,020,000	385,020,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	100 %	436,020,000		
502023	00	2.0	23	18	Penilaian Barang Milik Daerah	% SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	Tersedianya dokumen pencatatan aset yang tepat dan benar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	34,800,000	104,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	100 %	34,800,000		
502023	00	2.0	23	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	% SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Persentase keterpenuhan pencatatan mutasi barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen pencatatan aset yang tepat dan benar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	1 dokumen 4 dokumen	1 dokumen 4 dokumen 100 %	100 %	100 %	70,115,000	70,115,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	100 %	61,940,000		
502023	00	2.0	23	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	% SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	Jumlah Dolumen Barang Milik Daerah Jumlah Informasi yang relevan, transparan dan akuntabel terkait Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen pencatatan aset yang tepat dan benar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen 8 Dokumen	100 %	100 %	302,850,000	303,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	100 %	302,850,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
50024		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										908,357,523	1,491,681,869				958,607,523		
500241	2.0	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										908,357,523	1,491,681,869				958,607,523		
5002411	2.0	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	% Peningkatan PAD	Jumlah peraturan Perundang-Undangan Persentase ketersediaan Regulasi tentang Pajak Daerah	Tercapainya target Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2.22 %	2.22 %	1 dokumen	1 Perpu 100 %	100 %	100 %	278,482,523	406,556,869	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	% Peningkatan PAD	2.22 %	278,482,523	
5002412	2.0	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	% Peningkatan PAD	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi Potensi Pajak Daerah	Tercapainya target Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.22 %	2.22 %	8 kali	8 kali 20389582286 Rupiah	100 %	100 %	69,875,000	69,000,000	Pajak Restoran	% Peningkatan PAD	2.22 %	70,125,000	
5002414	2.0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	% Peningkatan PAD	jumlah Jenis Sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah yang digunakan dengan baik	Tercapainya target Pajak dan Retribusi Daerah		2.22 %	2.22 %		2 Jenis	100 %	100 %	0	279,500,000	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	% Peningkatan PAD	2.22 %	50,000,000
5002416	2.0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	% Peningkatan PAD	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi Jumlah jenis obyek pajak dan retribusi yang dimutakhirkan	Tercapainya target Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.22 %	2.22 %	3 dokumen	3 dokumen 7 Jenis	100 %	100 %	369,450,000	369,975,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	% Peningkatan PAD	2.22 %	150,630,278,603	
5002411	2.0	Penagihan Pajak Daerah	% Peningkatan PAD	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	Tercapainya target Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.22 %	2.22 %	100 %	150000 WP 100 %	100 %	100 %	179,050,000	319,700,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	% Peningkatan PAD	2.22 %	179,050,000	
5002413	2.0	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	% Peningkatan PAD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah Wilayah yang terkendalkan dan diawasi dalam Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya target Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.22 %	2.22 %	1 dokumen	1 dokumen 8 Kecamatan	100 %	100 %	6,850,000	46,200,000	Pajak Peneranga Jalan	n	% Peningkatan PAD	2.22 %	6,850,000
5002414	2.0	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	% Peningkatan PAD	Persentase capaian realisasi retribusi daerah	Tercapainya target Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.22 %	2.22 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,650,000	750,000	Retribusi Jasa Usaha		% Peningkatan PAD	2.22 %	4,650,000
TOTAL													150,528,771,196	145,039,603,418				298,174,397,730	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	0			KEUANGAN										27,525,000	40,335,000				27,525,000			
5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,515,000	22,225,000				11,515,000			
5	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah										11,515,000	22,225,000				11,515,000			
	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 %	100 %	2900 Lembar	2900 Lembar	100 %	100 %	1,515,000	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	1,515,000
5		0	2.0	0	Penyediaan Bahan/Materi al	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
5		0	2.0	0	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	100 %	100 %		63 kali	100 %	100 %	0	10,710,000	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	0
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										16,010,000	18,110,000				16,010,000		
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										16,010,000	18,110,000				16,010,000		
	0	0	2.0	1	Penagihan Pajak Daerah	% Peningkatan PAD	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	2.22 %	2.22 %	100 %	27527 WP 100 %	100 %	100 %	16,010,000	18,110,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan		% Peningkatan PAD	2.22 %	16,010,000
TOTAL																	27,525,000	40,335,000				55,050,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
5	0			KEUANGAN																		150,630,278,603					
	2																		22,525,000	29,045,000							
5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		11,515,000	15,935,000				
	2	1																							11,515,000		
5	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		11,515,000	15,935,000				
	2	1	6																						11,515,000		
5	0	0	2.0	0	Penyediaan	Persentase	jumlah Penyediaan	Persentase	Kab. Soppeng,								1,515,000	1,515,000	Bea		Persentase						
	2	1	6	5	Barang Cetak	Keterpenuhan	Barang Cetak dan	Pemenuhan	Donri Donri,	100 %	100 %	2900 Lembar	2900 Lembar	100 %	100 %			Perolehan	Keterpenuhan	100 %		1,515,000					
					dan	administrasi	Penggandaan (lembar)	Administrasi	Donri Donri									Hak Atas	administrasi								
					Penggandaan	perkantoran		Perkantoran										Tanah dan	perkantoran								
5	0	0	2.0	0	Penyediaan	Persentase	Jumlah jenis bahan/	Persentase	Kab. Soppeng,								10,000,000	10,000,000	Bea		Persentase						
	2	1	6	7	Bahan/Materi al	Keterpenuhan	material yang	Pemenuhan	Donri Donri,	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %			Perolehan	Keterpenuhan	100 %		10,000,000					
					administrasi	administrasi	disediakan	Administrasi	Donri Donri									Hak Atas	administrasi								
					perkantoran	perkantoran		Perkantoran										Tanah dan	perkantoran								
5	0	0	2.0	0	Penyelenggar	Persentase	Jumlah Rapat- Rapat	Persentase	Kab. Soppeng,								0	4,420,000	PENDAPAT	AN H	Persentase						
	2	1	6	9	aan Rapat	Keterpenuhan	Koordinasi dan	Pemenuhan	Donri Donri,	100 %	100 %		26 kali	100 %	100 %			ASLI DAERA	Keterpenuhan	100 %		0					
					Koordinasi dan	administrasi	Konsultasi SKPD	Administrasi	Semua									(PAD)	administrasi								
					Konsultasi SKPD	perkantoran		Perkantoran	Kelurahan										perkantoran								
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																		11,010,000	13,110,000			11,010,000
	2	4																									
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah																		11,010,000	13,110,000			11,010,000
	2	4	1																								
5	0	0	2.0	1	Penagihan Pajak		Jumlah Wajib Pajak	Persentase	Kab. Soppeng,				24377 WP					11,010,000	13,110,000	Pajak Bumi							
	2	4	1	1	Daerah	% Peningkatan PAD	Bumi dan Bangunan	Peningkatan	Donri Donri,	2.22 %	2.22 %	100 %	100 %	100 %	100 %				Bangunan	% Peningkatan PAD	2.22 %		11,010,000				
							tepat Waktu	Pendapatan Asli	Semua										Pedesaan								
							Persentase Jumlah SPPT	Daerah	Kelurahan										dan								
							yang terdistribusi																				
TOTAL																			22,525,000	29,045,000					45,050,000		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	0			KEUANGAN										24,025,000	32,075,000				150,630,278,603			
5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,515,000	17,465,000				11,515,000			
5	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah										11,515,000	17,465,000				11,515,000			
	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi perkantoran	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	100 %	100 %	2900 Lembar	2900 Lembar	100 %	100 %	1,515,000	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	1,515,000
	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi perkantoran	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran		Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi perkantoran		100 %	100 %			100 %	100 %	0	5,950,000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN H	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	0
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										12,510,000	14,610,000				12,510,000		
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										12,510,000	14,610,000				12,510,000		
	0	0	2.0	1	Penagihan Pajak Daerah	% Peningkatan PAD	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu Persentase Jumlah SPPT yang	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	2.22 %	2.22 %	100 %	28216 WP 100 %	100 %	100 %	12,510,000	14,610,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan		% Peningkatan PAD	2.22 %	12,510,000
TOTAL																	24,025,000	32,075,000				48,050,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	0			KEUANGAN										26,025,000	35,945,000			150,630,278,603				
5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,515,000	19,335,000			11,515,000				
5	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah										11,515,000	19,335,000			11,515,000				
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	Persentase Pemenuhan Adminitrasi perkantoran	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 %	100 %	2900 Lembar	2900 Lembar	100 %	100 %	1,515,000	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	1,515,000
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan/Materi al	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	Persentase Pemenuhan Adminitrasi perkantoran	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
5	0	0	2.0	0	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Adminitrasi perkantoran	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	100 %	100 %		46 kali	100 %	100 %	0	7,820,000	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	0
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										14,510,000	16,610,000			14,510,000			
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										14,510,000	16,610,000			14,510,000			
5	0	0	2.0	1	Penagihan Pajak Daerah	% Peningkatan PAD	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu Persentase Jumlah SPPT yang	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	2.22 %	2.22 %	100 %	33331 WP 100 %	100 %	100 %	14,510,000	16,610,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan		% Peningkatan PAD	2.22 %	14,510,000
TOTAL																26,025,000	35,945,000				52,050,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Target		Target	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	0			KEUANGAN										23,025,000	30,225,000	150,630,278,603						
5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,515,000	16,615,000	11,515,000						
5	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah										11,515,000	16,615,000	11,515,000						
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adminitrasi perkantoran	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	100 %	100 %	2900 Lembar	2900 Lembar	100 %	100 %	1,515,000	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	1,515,000
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adminitrasi perkantoran	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
5	0	0	2.0	0	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adminitrasi perkantoran	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	100 %	100 %		27 kali	100 %	100 %	0	5,100,000	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	0
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										11,510,000	13,610,000	11,510,000					
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										11,510,000	13,610,000	11,510,000					
5	0	0	2.0	1	Penagihan Pajak Daerah	% Peningkatan PAD	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu Persentase Jumlah SPPT yang	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	2.22 %	2.22 %	100 %	25183 WP 100 %	100 %	100 %	11,510,000	13,610,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan		% Peningkatan PAD	2.22 %	11,510,000
TOTAL																		23,025,000	30,225,000	46,050,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target		
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	0			KEUANGAN										26,525,000	36,615,000			150,630,278,603		
5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,515,000	19,505,000			11,515,000		
5	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah										11,515,000	19,505,000			11,515,000		
	0	0	2.0	0	Penyediaan	Persentase	Jumlah Penyediaan	Persentase	Kab. Soppeng,								Bea	Persentase		
5	2	1	6	5	Barang Cetakan	Keterpenuhan	Barang Cetakan dan	Pemenuhan	Marioriwawo,	100 %	100 %	2900 Lembar	2900 Lembar	100 %	100 %	1,515,000	1,515,000	Hak Atas	Keterpenuhan	100 %
					Penggandaan	administrasi	Penggandaan	Adminitrasi	Tettikenrarae								Tanah dan	administrasi		1,515,000
						perkantoran	(lembar)	perkantoran									Bangunan	perkantoran		
	0	0	2.0	0	Penyediaan	Persentase	Jumlah jenis	Persentase	Kab. Soppeng,	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Hak Atas	Persentase	
5	2	1	6	7	Bahan/Materi al	Keterpenuhan	bahan/material yang	Kebutuhan	Marioriwawo,								Tanah dan	Keterpenuhan	100 %	10,000,000
						administrasi	disediakan	Adminitrasi	Tettikenrarae								Bangunan	administrasi		
						perkantoran		perkantoran									(BPHTB)	perkantoran		
5	0	0	2.0	0	Penyelenggar	Persentase	Jumlah Rapat- Rapat	Persentase	Kab. Soppeng,	100 %	100 %		47 kali	100 %	100 %	0	7,990,000	PENDAPAT	AN H	
	2	1	6	9	aan Rapat	Keterpenuhan	Koordinasi dan	Pemenuhan	Marioriwawo,									ASLI DAERA	Keterpenuhan	100 %
					Koordinasi dan	administrasi	Konsultasi SKPD	Kebutuhan	Semua									administrasi		0
					Konsultasi SKPD	perkantoran		Adminitrasi	Kelurahan									perkantoran		
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										15,010,000	17,110,000			15,010,000	
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										15,010,000	17,110,000			15,010,000	
	0	0	2.0	1	Penagihan Pajak	% Peningkatan PAD	Jumlah Wajib Pajak	Persentase	Kab. Soppeng,	2.22 %	2.22 %	100 %	42467 WP	100 %	100 %	15,010,000	17,110,000	Pajak Bumi		
5	2	4	1	1	Daerah		Bumi dan Bangunan	Peningkatan	Marioriwawo,								Bangunan	% Peningkatan PAD	2.22 %	15,010,000
							tepat Waktu	Pendapatan Asli	Semua								Pedesaan			
							Persentase Jumlah	Daerah	Kelurahan								dan			
							SPPT yang													
TOTAL														26,525,000	36,615,000	53,050,000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	0			KEUANGAN										22,025,000	28,205,000				150,630,278,603			
5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,515,000	15,595,000				11,515,000			
5	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah										11,515,000	15,595,000				11,515,000			
	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (lembar)	Persentase Pemenuhan Adminitstrasi Perkantoran	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 %	100 %	2900 Lembar	2900 Lembar	100 %	100 %	1,515,000	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	1,515,000
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan/Materi al	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	Persentase Pemenuhan Adminitstrasi Perkantoran	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
5	0	0	2.0	0	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Adminitstrasi Perkantoran		100 %	100 %			100 %	100 %	0	4,080,000	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	0
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										10,510,000	12,610,000				10,510,000		
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										10,510,000	12,610,000				10,510,000		
5	0	0	2.0	1	Penagihan Pajak Daerah	% Peningkatan PAD	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu Persentase Jumlah SPPT yang	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	2.22 %	2.22 %	100 %	15236 WP 100 %	100 %	100 %	10,510,000	12,610,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan		% Peningkatan PAD	2.22 %	10,510,000
TOTAL															22,025,000	28,205,000				44,050,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	0			KEUANGAN										20,525,000	26,025,000				150,630,278,603			
5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,515,000	14,915,000				11,515,000			
5	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah										11,515,000	14,915,000				11,515,000			
5	0	0	2.0	0	Penyediaan	Persentase	Jumlah Penyediaan	Persentase	Kab. Soppeng,						1,515,000	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	1,515,000	
	2	1	6	5	Barang Cetakan dan Penggandaan	Keterpenuhan administrasi perkantoran	Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Citta, Citta	100 %	100 %	2900 Lembar	2900 Lembar	100 %	100 %							
5	0	0	2.0	0		Persentase	Jumlah jenis	Persentase	Kab. Soppeng,						10,000,000	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000	
	2	1	6	7	Penyediaan Bahan/Materi al	Keterpenuhan administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Citta, Citta	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %							
5	0	0	2.0	0	Penyelenggara	Persentase	Jumlah Rapat- Rapat	Persentase	Kab. Soppeng,						0	3,400,000	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran	100 %	0	
	2	1	6	9	aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keterpenuhan administrasi perkantoran	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Citta, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 Kali	100 %	100 %								
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										9,010,000	11,110,000				9,010,000		
	2	4																				
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										9,010,000	11,110,000				9,010,000		
	2	4	1																			
5	0	0	2.0	1	Penagihan Pajak Daerah	% Peningkatan PAD	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	2.22 %	2.22 %	100 %	13287 WP 100 %	100 %	100 %	9,010,000	11,110,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan		% Peningkatan PAD	2.22 %	9,010,000
	2	4	1	1			Persentase Jumlah SPPT yang															
TOTAL													20,525,000	26,025,000					41,050,000			

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021. Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Review Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Soppeng, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat di laksanakan dengan baik di sertai kerja sama dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sesuai dengan tahapan–tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan **good governance** dan **public service** yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Pengselolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 26 Agustus 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19680102 199603 1 005

